



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

#### 1. Permasalahan.

Focal point penanggulangan Narkotika di wilayah Kalimantan Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Timur melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama baik pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah (OPD), lembaga dan kementerian serta swasta.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Kalimantan Timur adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Pandemi COVID-19 sehingga membatasi kegiatan berskala besar yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan kampanye maupun informasi dan edukasi lainnya.
- b. Kegiatan penyampaian informasi secara virtual baik dari BNN maupun BNN Provinsi dirasa kurang maksimal, karena keterbatasan ataupun ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan (seperti jaringan internet yang kurang baik).
- c. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sulit, seperti banyaknya perbukitan sungai dan laut.
- d. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan banyaknya daerah terpencil.
- e. Kurangnya pegawai/personil baik di BNNP maupun BNNK jajaran.
- f. Tidak memiliki transportasi air baik berupa kapal maupun speedboat.

#### 2. Hasil Evaluasi

BNNP Kaltim membawahi 3 (tiga) BNNK yaitu BNNK Samarinda, BNNK Balikpapan serta BNNK Bontang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Sehingga masih terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang belum terbentuk BNNK. Hal tersebut menjadikan

pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Kaltim menjadi kurang maksimal, mengingat luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur dan yang mencapai 127.346,92 km<sup>2</sup> dan luas wilayah lautan 25.656 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 3,77 juta jiwa (52% laki-laki; 48% wanita) dengan kelompok usia terbanyak adalah usia 30 -34 tahun dan 0 – 9 tahun. Selain itu letak geografis Provinsi Kalimantan Timur, dimana bagian utara berbatasan dengan Provinsi Kaltara; bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalsel; serta bagian Barat berbatasan dengan Kalbar, Kalteng dan juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia mempunyai banyak akses/pintu masuk yang menjadikannya sangat rawan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba.

Pada tahun 2018 jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) dilingkungan BNNP dan jajaran sebanyak 86 kasus, pada tahun 2019 jumlah LKN sebanyak 72 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 52 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus, hal ini terlihat terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun mulai 2020 hingga 2021 karena adanya pandemi covid-19.

Untuk jumlah tersangka diperoleh bahwa pada tahun 2018 jumlah tersangka kasus narkotika dilingkungan BNNP dan jajaran sebanyak 128 orang, pada tahun 2019 jumlah tersangka sebanyak 103 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 65 orang dan 54 orang pada tahun 2021, hal ini terlihat terjadi penurunan jumlah tersangka pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19.

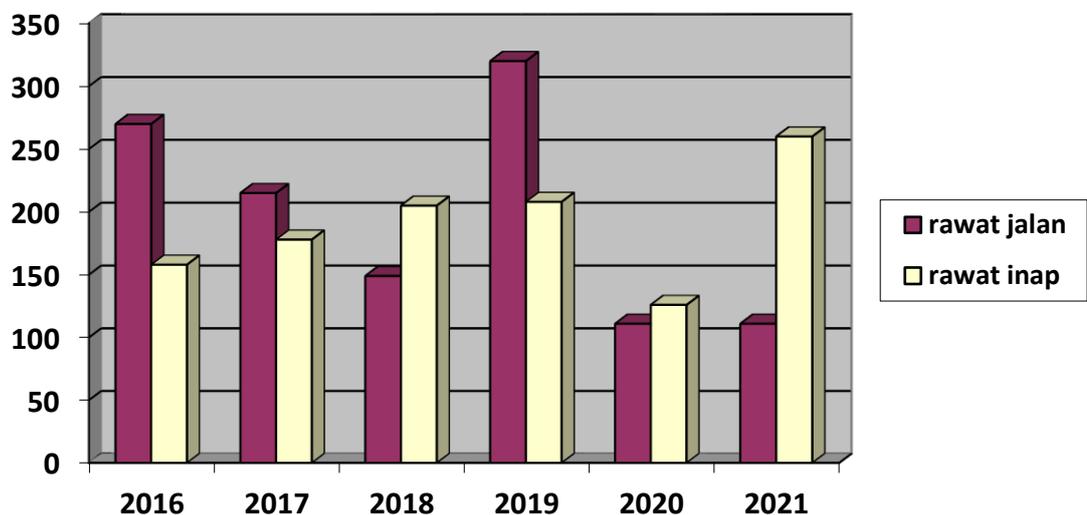
Adapun data jumlah barang bukti BNNP Kaltim dan jajaran dari tahun 2021 yaitu sebagai berikut yaitu untuk shabu sebanyak 7.195 g, cannabinoid 78,99 g, ganja 4.600 g dan ekstasi sebanyak 3,5 butir, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 untuk shabu sebanyak 6.882 g, dan ganja 3.527 g.

Berdasarkan hasil survei BNN bekerjasama LIPI dan grafik diatas dengan sasaran survei pekerja, pelajar dan ibu rumah tangga, diperoleh bahwa pada tahun 2014, provinsi Kalimantan Timur berada diposisi ke -2 (nilai 3,07%) dari 34 provinsi data prevalensi penyalahgunaan narkotika, hal ini diatas rata-rata prevalensi nasional (nilai 2,18 %). Demikian pula pada tahun 2017, provinsi Kaltim masih menduduki urutan ke-atas yaitu urutan ke-3 (nilai 1,77%) dari 34 provinsi dan juga diatas rata-rata angka prevalensi nasional (nilai 2,1%). Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan, provinsi Kaltim menduduki urutan ke 33 (nilai 0,1%) dari 34 provinsi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika (nilai 1,8%). Hal ini disebabkan hasil kerjasama yang kuat antara BNNP, Polda dan Pemerintah Daerah sewilayah Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2021 angka

prevalensi penyalahgunaan narkoba terjadi kenaikan untuk skala nasional yaitu sebesar 1,9%.

Untuk angka prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk kategori pernah pakai semasa hidup pada tahun 2019 diperoleh sebesar 0,5% atau sebanyak 16.963 orang, berada di urutan yang ke 26 dari 28 provinsi se Indonesia Adapun dari segi usia pertama kali menggunakan narkoba secara nasional berkisar antara umur 17 – 19 tahun, sedangkan untuk kewilayahan Kalimantan Timur berkisar di umur 13 – 18 tahun . Untuk kategori pengguna narkoba secara nasional terbanyak berada pada kisaran usia produktif 35 – 44 tahun, hal ini sesuai/relevan dengan data berdasarkan jenis pekerjaan untuk kewilayahan Kalimantan Timur terbesar dilingkungan swasta (59%, data tahun 2021).

Data Jumlah Klien Rehabilitasi



Dari grafik diatas diperoleh terjadi penurunan jumlah klien rehabilitasi baik pada rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2020 ini disebabkan karena mulai terjadi pandemic covid-19 , kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah klien rehabilitasi rawat inap.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2022**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>2 Kabupaten Kota</b>	Rp 300.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>2 Kabupaten Kota</b>	Rp 396.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	<b>3 Kabupaten Kota</b>	Rp 842.370.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	<b>3 Kawasan</b>	Rp 88.284.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	<b>2,60 Indeks</b>	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	<b>35 Orang</b>	Rp 256.186.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	<b>25 Orang</b>	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	<b>4 Unit</b>	Rp 456.517.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	<b>3,4 Indeks</b>	Rp 79.800.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	<b>1 Peta Jaringan</b>	Rp 150.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	<b>25 Berkas Perkara</b>	Rp 1.400.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	<b>100 Indeks</b>	<b>Rp 437.135.000</b>
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	<b>100 Indeks</b>	
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	<b>90 Indeks</b>	<b>Rp 149.820.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	<b>3 Kab/kota</b>	
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	<b>95 Indeks</b>	<b>Rp 9.912.258.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	<b>3 Kab/Kota</b>	

*\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi, perhitungan dibuat sebelum adanya perjanjian kinerja TA. 2022*

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Kalimantan Timur, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

**Lampiran 1**  
**Matrik Rencana Volume Rincian Output**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	<b>4 Sekolah</b>
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	<b>35 Orang</b>
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	<b>20</b>
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	<b>7 Desa</b>
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	<b>3 Kab/kota</b>
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	<b>4 Kawasan</b>
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	<b>35 Orang</b>
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	<b>25 Orang</b>
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	<b>4 Lembaga</b>
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<b>3 Lembaga</b>
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	<b>5 Unit</b>
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	<b>4 Unit</b>
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	<b>3,2 Indeks</b>
		7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	<b>25 Kasus</b>
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	<b>100 Indeks</b>
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	<b>100 Indeks</b>
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	<b>90 Indeks</b>
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	<b>3 Kabupaten/Kota</b>
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	<b>95 Indeks</b>
			Layanan Perkantoran	<b>3 Kabupaten/Kota</b>



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**JL. RPAK INDAH KM. 1 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG SAMARINDA 75126**  
**TELP./FAX. (0541) 6276879**  
**E-MAIL : [BNNP.KALIMANTANTIMUR@GMAIL.COM](mailto:BNNP.KALIMANTANTIMUR@GMAIL.COM)**  
**WEBSITE : [KALTIM.BNN.GO.ID](http://KALTIM.BNN.GO.ID)**